

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan LAKIP pertama dalam Rencana Strategis Kementerian setelah bergabung kembali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Oktober tahun 2011.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman berisi laporan capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2012 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 dan Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Seperti diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II berkaitan dengan pergeseran dan penempatan Menteri dan Wakil Menteri baru, sekaligus mengubah nomenklatur, tugas fungsi, dan kinerja dua kementerian baru pada Bulan Oktober 2011, yang dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan bidang kebudayaan masuk dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggaran Eksisting (APBN) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman masih berada pada DIPA Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, sedangkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penambahan (APBNP), seluruh DIPA dari Direktorat Pelestarian cagar Budaya dan Permuseuman sudah berada di bawah Kementerian dan Kebudayaan, sehingga LAKIP perlu disusun pula sesuai dengan panduan dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan nomenklatur ini juga membawa dampak yang kompleks, tidak hanya menyangkut penyesuaian tugas dan fungsi di masing-masing lembaga, melainkan juga terkait penyesuaian administrasi perkantoran, personalia, konsekuensi anggaran, dan urusan lainnya. Namun demikian, telah dibentuk tim yang bekerja untuk melakukan penataan fungsi, personalia, dan asset yang terkait dengan perubahan nomenklatur tersebut.

Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2012 berisi program dan kegiatan yang harus diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan di bidang cagar budaya dan permuseuman yang terkait dengan kegiatan pelestarian yang meliputi 3 eks Direktorat gabungan, yaitu Direktorat Tinggalan Purbakala, Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial, serta Direktorat Museum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2012 menetapkan tiga tujuan yang dijabarkan kembali ke dalam lima sasaran strategis. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah 1) Peningkatan pelestarian Cagar budaya Indonesia, 2) Peningkatan kualitas museum di Indonesia, dan 3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategisnya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam APBN didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.650.000.000; (seratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut belum termasuk anggaran Tugas Pembantuan kepada 9 Pemerintah Daerah sebesar Rp. 42.550.000.000; (empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Capaian realisasi dari alokasi anggaran yang diberikan kepada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah sebesar Rp. 70.502.000.000; (tujuh puluh milyar lima ratus dua juta rupiah) dengan presentase capaian 52,7%. Pencapaian ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan waktu yang ada, yaitu kurang lebih hanya 4 bulan saja. Untuk alokasi anggaran Tugas Pembantuan kepada 9 daerah Penerima Anggaran, akuntabilitasnya dilaporkan oleh masing-masing Daerah tersebut. Sedangkan untuk APNB, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 23.224.748.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh empat tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan penyerapan anggarannya sebesar Rp.16.433.529.000,-(enam belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 70,8%.

Secara umum dapat dilaporkan pula bahwa hasil capaian kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman selama tahun 2012 telah memenuhi sasaran strategis yang ditetapkan. Namun, untuk realisasi beberapa Indikator tidak dapat terlaksana, sebab dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang muncul. Kendala dan permasalahan yang paling besar adalah pergeseran organisasi yang dialami oleh Bidang Kebudayaan, dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tengah-tengah tahun anggaran.

Konsekuensi logis yang dihasilkan adalah ketidakmampuan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam menyelesaikan seluruh kegiatan APBN yang notabene merupakan gabungan dari 3 Direktorat lama dan ditambah lagi dengan kegiatan APBN yang jumlah anggarannya lebih dari 5 kali lipat anggaran gabungan 3 Direktorat lama pada APBN. Ketidakmampuan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan seluruh kegiatan tersebut selain disebabkan karena waktu, tentunya disebabkan faktor sumber daya manusia. Jumlah SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman kurang memadai dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan tersebut. Jumlah SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tidak sebanding dengan kegiatan yang diampu, sebab kegiatan gabungan dari 3 Direktorat dilaksanakan oleh hanya sepertiga SDM nya saja.

Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil evaluasi internal yang kami lakukan selama satu tahun ini, kami dapat merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2013 sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman baik secara mutu dan jumlah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan di masa-masa yang akan datang;
2. Meningkatkan koordinasi yang sinergis, baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, terutama instansi yang menangani Kebudayaan di daerah.